

DETERMINASI *FISCAL STRESS* PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ilham Sanjaya¹, Rita Martini^{*1}, Muhammad Fauzan Ahnaf²,
Anton Trianto³

¹Accounting Department, Polytechnic State of Sriwijaya, Palembang 30139, Indonesia

²PT. Truckking Lintas Sarana, Jakarta 12950, Indonesia

³ Universitas Sjakhyakirti

E-mail: ritamartini@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap fiscal stress. Dengan purposive sampling didapatkan 15 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang menjadi sampel. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta data berupa data Produk Regional Domestik dan Bruto. Pengujian menghasilkan pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap fiscal stress sedangkan pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap fiscal stress.

Kata Kunci: Belanja Modal; Fiscal Stress; Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

This study aims to determine the effect of the growth of local revenue (PAD), capital expenditure growth, and economic growth on fiscal stress. Fifteen district/city governments in South Sumatra were sampled by purposive sampling. Secondary data is in the form of Realization Reports of Regional Revenue and Expenditure Budgets and data in the form of Domestic and Gross Regional Product data. The test results in capital expenditure growth affecting fiscal stress, while PAD growth and economic growth have no impact on budgetary pressure.

Keywords: Capital Expenditures; Fiscal Stress; Locally-generated revenue; Economic growth.

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi akan mendorong terjadinya disparitas fiskal mengingat setiap daerah memiliki kesiapan yang berbeda-beda baik dari segi potensi sumber daya maupun kemampuan manajerial keuangan daerahnya. Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber- sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Sehingga pada gilirannya memicu suatu daerah mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*).

Usaha optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya dalam rangka membiayai pembangunan di daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat (Martini et al., 2019). Namun, usaha daerah untuk meningkatkan kemandiriannya ini ternyata memicu daerah tersebut untuk mengalami fiscal stress yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa sebelum otonomi daerah (Suyanto, 2017) Seringkali, penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah tidaklah cukup untuk

membiayai belanja modal ataupun pembangunan di daerahnya (Martini et al., 2020). Konsekuensinya, *fiscal stress* yang tinggi akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan daerah. Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah daerah biasanya bergantung pada penerimaan yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Penurunan kegiatan perekonomian di suatu daerah tentu saja menjadi penyebab berkurangnya PAD tersebut. Penurunan kegiatan perekonomian ini bisa saja disebabkan oleh faktor politik, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, hingga faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti terjadinya bencana alam permasalahan tersebut menyebabkan perolehan PAD menjadi lebih rendah serta tidak menentu. Kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola potensi di daerahnya secara mandiri memang diharapkan mampu meningkatkan PAD sehingga mampu melepaskan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. (Kuncoro, 2015) menyatakan PAD seharusnya menjadi tolok ukur kondisi kemampuan keuangan daerah dalam mengurus rumah tangganya.

Anggaran belanja daerah selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di daerah tersebut. Setiap daerah yang melaksanakan otonomi dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali setiap potensi penerimaan baru agar ketersediaan dana untuk membiayai belanja daerah tetap tersedia (Martini et al., 2019). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana “kue pembangunan” diperbesar, tapi belum menggambarkan bagaimana “kue pembangunan” tersebut di distribusikan secara merata dalam rangka kesejahteraan masyarakat (Fristanto, 2015).

Studi tentang *fiscal stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya, penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun (Fristanto, 2015). Selain karena tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat yang masih cukup tinggi, dalam tahun-tahun terakhir juga terjadi penurunan nilai pada komoditas pada sektor perkebunan yang menjadi sektor unggulan di Sumatera Selatan. Sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat menurun dan berdampak pada perolehan PAD menjadi tidak menentu. Hal ini memicu untuk dilaksanakan penelitian di provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini merupakan upaya memperbaiki hasil studi penelitian sebelumnya dengan mengganti indikator variabel operasional *fiscal stress* dengan ukuran yang diperkenalkan oleh (Arnett, 2011) yaitu Saldo Dana (*fund balance*). Fund balance (Saldo Dana = selisih antara penerimaan dan pengeluaran) sangat diberi bobot dalam penentuan indikator *fiscal stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Pemerintah daerah mungkin harus berjuang dalam menghadapi permasalahan finansial, tetapi mereka masih mampu bertahan beroperasi jika memiliki Saldo Dana yang memadai untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa PAD adalah penerimaan

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan (Halim, 2014) mengemukakan bahwa PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain lain pendapatan yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut (Kuncoro, 2015) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB menurut soemitro (Septira, Farida, & Prawira, 2019) dibagi menjadi dua cara, yaitu :

a. PDRB atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

b. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambahan barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya.

2.3 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

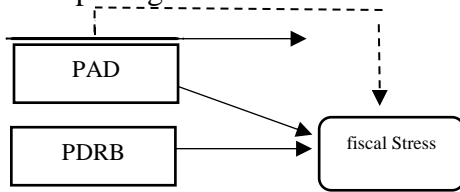
Fiscal Stress

Fiscal stress merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis sehingga menimbulkan beberapa aspek dan interpretasi dalam mendefinisikannya (Rakabe, 2013). Berdasarkan literatur yang ada, menunjukkan bahwa *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Septira et al., 2019). Sedangkan, pengertian *fiscal stress* yang di definisikan (Arnett, 2011) adalah sebagai kondisi dimana pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang dan pemerintah juga tidak mampu meningkatkan penerimaan daerahnya atau menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mengindikasikan adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress* (Shamsub & Akoto, 2004) dalam (Septira et al., 2019). *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

3. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

4. HIPOTESIS

- H1: Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Fiscal Stress pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- H2: Pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap Fiscal Stress pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- H3: Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap Fiscal Stress pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
- H4: Pertumbuhan PAD, PDRB, Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Fiscal Stress pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

4.1 Pengaruh PAD terhadap Fiscal Stress

Pertumbuhan PAD memiliki dampak atas *fiscal stress* suatu daerah (Muda, 2012). Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan PAD mempengaruhi tingkat *fiscal stress* suatu daerah. Adanya perubahan baik kenaikan maupun penurunan dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh daerah tersebut dan komponen dari sektor penerimaan dalam APBD yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi *iscal Stress* adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi PAD.

4.2 Pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap Fiscal Stress

Pertumbuhan PAD dalam jangka panjang akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk menggali sumber-sumber potensi daerahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Suatu daerah dapat dikatakan tidak sejahtera apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Dan jika yang terjadi sebaliknya maka dapat diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakatnya. Maka dari itu, peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Soemitro, 2017). Keberhasilan peningkatan PAD baiknya tidak hanya diukur dengan jumlah yang diterima tetapi diukur juga dengan perannya dalam mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan memberikan pengaruh terhadap *fiscal stress* (Fristanto, 2015).

4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Fiscal Stress

Belanja Modal seperti infrastruktur dalam jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila tidak diimbangi dengan penerimaan yang signifikan maka hal

tersebut dapat menimbulkan *fiscal stress*. Mengingat *fiscal stress* disini dicerminkan dengan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Sedangkan dalam jangka panjang, dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD di masa mendatang. Hal ini membuktikan pertumbuhan belanja modal dapat mempengaruhi *fiscal stress*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Fristanto, 2015) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Semakin besar total belanja daerah maka tekanan fiskal (*fiscal stress*) akan lebih tinggi.

5. METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.bpk.go.id berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD) serta data dari website www.bps.go.id

Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Domestik Regional Bruto dari 13 Kabupaten dan 4 Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2015 – 2017. Data sampel diambil dengan menggunakan *puposive sampling* dengan kriteria yaitu:

- a. Kabupaten/Kota di Provnsi Sumatera Selatan yang memiliki laopran keuangan yang telah diaudit oleh bpk dari tahun 2014-2017
- b. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki data pertumbuhan PDRB dari tahun 2015-2017

5.1. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari data runtun waktu (*time-series data*) dan data silang (*cross section data*). Data *time series* merupakan data suatu objek yang terdiri atas beberapa periode. Sedangkan data silang (*cross-section*) merupakan data beberapa objek pada suatu saat. Dalam pemilihan data panel yang tepat, ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Penggunaan FEM telah terpilih 2 kali yaitu pada *Chow Test* dan *Hausman Test*. Dengan demikian dapat disimpulkan dari ketiga model (CEM, FEM dan REM), penggunaan model yang terbaik adalah FEM dalam menginterpretasikan regresi data panel penelitian.

5.2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan EVIEWS menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel independen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakan yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir (Ghozali, 2017).

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. (Priyatno, 2012). Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Uji *White*. Penelitian ini menggunakan *lagrange Multiplier Test* atau sering disebut dengan *Breusch Godfrey Correlation Test*. Interpretasi

hasil LM test dapat dilihat pada nilai probabilitas Obs*R-Squared dengan dasar penilaian sebagai berikut: Nilai probabilitas Obs*R-Squared > 0.05 , berarti tidak ada autokorelasi atau nilai probabilitas < 0.05 , berarti ada autokorelasi (Winarno, 2015).

5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyatno, 2012) Regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas (Sanusi, 2016). Dengan demikian, regresi linear berganda dinyatakan dalam persamaan matematika.

5.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2017). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2017).

5.5. Uji Statistik t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi (Priyatno, 2012). Dasar pengambilan keputusannya dilakukan dengan berdasar nilai signifikansi t masing-masing variabel pada *output* hasil regresi dengan EViews 10 dengan tingkat signifikansi 0,05.

5.6. Uji Statistik F

Uji F yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (Priyatno, 2012). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2017). Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan *Econometric Views* (EViews) dengan *significance level* 0,05 (5%)

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Hasil Penelitian

Hasil uji normalitas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 3.795548 dan nilai probability (p-value) sebesar 0.149902. Nilai probability (p-value) lebih dari α ($0.149902 > 0.05$), maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas terlihat nilai VIF setiap variabel independen pada kolom Centered VIF memiliki nilai di bawah angka 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadinya multikolinieritas pada setiap variabel independen tersebut. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 5.539899 dan nilai *Probability Chi-Square* (9) sebesar 0.7849. Nilai p-value (*probability Chi-Square*) lebih dari α ($0.7849 > 0.05$), maka H_0 diterima. Jadi dapat

disimpulkan data tidak terjadi heteroskedastisitas. Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 1.335313 dan nilai Probability Chi-Square (3) sebesar 0.5129. Nilai p-value (probability Chi-Square) lebih dari α ($0.5129 > 0.05$), maka H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan data tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil estimasi untuk Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) didapatkan hasil persamaan:

$$\text{Fiscal Stress} = -1333.070 + 0.105903 \text{ Pertumbuhan PAD} + 17.27545 \text{ Pertumbuhan PDRB} - 1.70521 \text{ Pertumbuhan Belanja Modal} + e$$

Berdasarkan tabel 1 hasil koefisien determinasi diketahui nilai R2 sebesar 0.96 artinya persentase sumbangan pengaruh pertumbuhan PAD, PDRB, belanja modal terhadap Fiscal Stress sebesar 96%, sedangkan sisanya sebesar 4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Tabel 1 Effects Specification

Effects Specification	
R-squared	0.978262
Adjusted R-squared	0.964576
S.E. of regression	89.19330
F-statistic	71.47552
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Output Eviews 10* (2019)

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0.05 maka H_1 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H_1 ditolak. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0.05 ($0.7224 > 0.05$) maka **H1 ditolak**. maka dapat disimpulkan variabel Pertumbuhan PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Nilai t hitung $< t$ tabel ($0.912612 < 2.833$) dan signifikansi pada uji t lebih dari 0.05 ($0.3695 > 0.05$) maka **H2 ditolak**. Karena nilai t hitung $< t$ tabel ($-2.941912 < -2.833$) signifikansi pada uji t kurang dari 0.05 ($0.0066 < 0.05$) maka **H3 diterima**. Jadi dapat disimpulkan variabel pertumbuhan belanja modal secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap *fiscal stress*.

Tabel 2. Coefficient

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1333.070	94.32756	-14.13235	0.0000
X1	0.105903	0.294954	0.359050	0.7224
X2	17.27545	18.92966	0.912612	0.3695
X3	-1.505721	0.511817	-2.941912	0.0066

Sumber: *Output Eviews 10* (2019)

Hasil uji F dapat diketahui F hitung sebesar 71.47552 untuk menentukan F tabel, dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0.05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 4, dan df 2 (n-k-1) atau $45-3-1 = 41$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel

independen). Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,833 (lihat pada tabel statistik). Karena F hitung $>$ F tabel ($71.47552 > 2,833$) dan signifikansi pada uji F kurang dari 0.05 ($0.000000 < 0.05$) maka **H4 diterima**. Jadi dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 71.41094 dengan nilai signifikansi 0.000000, maka dapat disimpulkan variabel pertumbuhan PAD, PDRB, dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *Fiscal Stress*

6.2. Pembahasan

Pertumbuhan PAD yang terus meningkat pada dasarnya dapat mengurangi kondisi *fiscal stress*, karena *fiscal stress* itu sendiri menunjukkan keadaan daerah yang masih belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut. Pada kenyataannya peningkatan PAD pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan belum mampu untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pada tahun 2015-2017 rata-rata tingkat *fiscal stress* kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami fluktuatif dan dapat dikatakan cenderung menurun, hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan PAD yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga dapat dijadikan penyebab bagaimana Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Kondisi yang ideal pada perekonomian suatu daerah adalah dimana PDRB selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dari PDRB, pemerintah daerah dapat memungut penerimaan di daerahnya yang juga meningkat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis deskriptif rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun 2015-2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tingkat *fiscal stress* pertumbuhan PDRB tidak memiliki korelasi, dimana *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan.

Fiscal stress (Arnett, 2011) ialah sebagai suatu ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek maupun jangka panjang yang timbul dan dapat disertai ketidakmampuan meningkatkan pendapatan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya penyediaan barang dan jasa untuk publik. Apabila pendapatan lebih kecil daripada belanja maka daerah tersebut diindikasikan dalam kondisi *fiscal stress* begitupun sebaliknya jika pendapatan lebih besar daripada belanja maka daerah tersebut tidak dalam kondisi *fiscal stress*.

Pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* (Fristanto, 2015). Apabila suatu daerah meningkatkan pengeluarannya namun tidak diimbangi dengan peningkatan PAD yang signifikan maka daerah tersebut dapat mengalami *fiscal stress* dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Martini et al., 2020). Namun (Muda, 2012) dan (Septira et al., 2019) menyatakan pertumbuhan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*.

Timbunya *fiscal stress* disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang menurun atau resesi, kemunduran industri sehingga berkurangnya hasil pajak dan peran ketidak efisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai dan tingginya pengeluaran (Shamsub & Akoto, 2004). Namun, *fiscal stress* tidak selalu berdampak negatif karena disaat pemerintah daerah mengalami *fiscal stress* yang tinggi ada kecenderungan pemerintah akan menggali PAD secara lebih ketat agar dapat membiayai pengeluarannya.

Potensi produk domestik yang cukup baik akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat akan meningkat dan merata. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi masyarakat dalam produktivitas menggali sumber potensi yang ada pada daerah, yang berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah, serta mengurangi terjadinya fenomena *fiscal stress*, karena daerah akan dapat membiayai pembangunan daerahnya melalui pemasukan daerah yang dimiliki. Pertumbuhan PAD, PDRB dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* (Fristanto, 2015), (Septira et al., 2019),

(Muda, 2012) dan (Martini et al., 2019). Namun (Gunara, 2017) mengemukakan *fiscal stress* tidak terpengaruh secara simultan oleh pertumbuhan PAD, PDRB, dan belanja modal

7. KESIMPULAN

Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal tersebut dikarenakan PAD yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota di provinsi masih bernilai defisit yang sangat besar jika dibandingkan dengan alokasi total belanja, sehingga PAD belum menjadi sumber utama pembiayaan untuk alokasi belanja. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dengan PDRB tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Hal ini disebabkan fluktuasi pertumbuhan PDRB yang naik dan turun sehingga terbukti tidak dapat mempengaruhi kondisi *fiscal stress*. Pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, mengindikasikan setiap peningkatan belanja modal akan berdampak langsung dengan tingkat *fiscal stress* di daerah tersebut. Semakin besar alokasi belanja yang dianggarkan, maka kemungkinan daerah mengalami *fiscal stress* juga makin tinggi. Idealnya belanja modal setiap tahunnya mengalami peningkatan karena alokasi belanja ini digunakan untuk pelayanan publik dan hal hal produktif dan akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, namun jika besaran alokasi belanja tidak diimbangi dengan PAD yang memadai, maka akan berdampak terhadap *fiscal stress*.

Pertumbuhan PAD, PDRB dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap *fiscal stress*. Upaya Pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan PDRB kemudian pengelolaan alokasi belanja modal yang tepat dapat mempengaruhi tingkat *fiscal stress*.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola alokasi belanja yang dilakukan secara tepat, sehingga mendorong percepatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengoptimalkan upaya peningkatan sumber-sumber PAD dengan menggali potensi sumber kekayaan yang dimiliki daerah, sehingga dapat memenuhi pengeluarannya dan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*, misalnya DAU untuk mengukur *fiscal stress* di pemerintah daerah. Bila besaran DAU membesar, dapat dikatakan kemampuan pembiayaan daerah terhadap belanja wajibnya mengecil, hal ini mungkin dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sedang mengalami *fiscal stress*. Peneliti juga dapat menambah jangka waktu dan objek penelitian untuk meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, M., Muthia, Y. B., & Indrawati, N. (2017). Variabel Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 25, 45–60.
- Ahmad, H. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, *Fiscal Stress*, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. 152–166.
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arnett, S. (2011). *Fiscal Stress in the U . S . States : an Analysis of Measures and Responses* Copyright 2011 By Sarah Arnett *Fiscal Stress in the U . S . Georgia Institute of Technology*.
- Brodjonegoro, B. P., & Dartanto, T. (2013). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian dan Kesenjangan Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan. *Indonesian Journal of Economic and Development*, 4.
- Fristanto, R. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress* Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunara, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Kalimantan Tengah. Univerisity of Gajah Mada.
- Halim, A. (2001). Anggaran daerah dan “*fiscal stress*” (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 16(4), 346–357.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik. jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik. jakarta: Salemba Empat.
- Khakim, L., Hermawan, I., Solechan, A., & PS, V. T. (2017). Potensi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan,
- Kuncoro, M. (2015). Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martini, Rita, Agustin, Resy, & Sari, K. R. 2020. Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. TEST Engineering & Management, 82, 9925-9935.
- Martini, Rita, Sari, K. R., Somadi, T., & Karman, I. W. 2019. Financial Independence of the South Sumatra Regional Government. Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track (iCASTSS 2019). Volume 354, pp. 360-364. Denpasar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75>
- Martini, Rita, Zulkifli, Hartati, Sukmini, & Widyastuti, Endah. 2019. Dimension of Village Expenditure in Development Sector. Proceedings of the 3rd Forum in research, Science, and Thecnology (FIRST 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 431, pp. 6-9. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200407.002>.
- Muda, I. (2012). Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Keuangan & Bisnis, 4 No.1.
- Priyatno, D. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. jakarta: Andi Publisher.
- Pulungan, F. S., Daulay, M., & Siregar, H. S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating pada kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah”INTEGRITAS”, 3(2).
- Rakabe, E. (2013). The State of Fiscal Stress in South Africa ’ s Provinces : Improving fiscal performance List of Figures.
- Sanusi, A. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwono, J. (2016). Prosedur-prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan EViews (1st ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Septira, F., Farida, I., & Prawira, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, 7(1), 57–64.
- Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 16(1), 40–61.
- Soemitro, S. (2017). Analisis Ekonomi Jawa Barat. Bandung: Unpad Press.
- Suyanto, S. (2017). Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. Develop, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.70>

- Syaiful. (2008). Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan. Jakarta.
- West, J. P. (2014). Municipal Government Strategies for Controlling Personnel Costs During the Fiscal Storm. (March 2011). <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-23-03-2011-B005>
- Winarno, W. Wahyu. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.